

# KERJASAMA PERTAHANAN TAIWAN - AMERIKA SERIKAT MENGHADAPI KEBIJAKAN LUAR NEGERI TIONGKOK ONE CHINA POLICY 2018-2023

Sekar Widyasari<sup>1</sup>, Iing Nurdin<sup>2</sup>, Suwarti Sari<sup>3</sup>

Program Studi Magister Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Jenderal Achmad Yani

## **ABSTRACT**

*The defense cooperation between Taiwan and the United States has become a key element in the geopolitical dynamics of East Asia, especially within the context of China's foreign policy known as the "One China Policy." This policy, which asserts that Taiwan is an inseparable part of China, has driven China to take various measures to isolate Taiwan on the international stage and reinforce its sovereignty claims over the island. Since 2018, tensions in the region have escalated as China has taken increasingly aggressive actions, including heightened military activities around the Taiwan Strait and diplomatic campaigns aimed at reducing international recognition of Taiwan. In response to these threats, Taiwan has strengthened its defense cooperation with the United States. The period from 2018 to 2023 was marked by increased U.S. arms sales to Taiwan, joint military training, and enhanced strategic collaboration in various areas. The United States, while officially recognizing the "One China Policy," continues to support Taiwan through the Taiwan Relations Act, which allows for the provision of defense assistance to maintain stability in the region. China's response to this cooperation has been firm, including increased military exercises around Taiwan and intensifying diplomatic efforts to isolate Taiwan internationally. These rising tensions have not only impacted U.S.-China relations but have also raised concerns about regional and global stability. Through this analysis, it becomes clear that Taiwan-U.S. defense cooperation has far-reaching implications for security dynamics in East Asia and could potentially influence the international order in the long term.*

*Keywords : Taiwan, Amerika Serikat, defense cooperation and One China Policy*

## **ABSTRAK**

Hubungan kerja sama pertahanan antara Taiwan dan Amerika Serikat telah menjadi salah satu elemen kunci dalam dinamika geopolitik Asia Timur, terutama dalam konteks kebijakan luar negeri Tiongkok yang dikenal sebagai "One China Policy." Kebijakan ini, yang menegaskan bahwa Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari Tiongkok, telah mendorong Tiongkok untuk mengambil berbagai langkah untuk mengisolasi Taiwan di panggung internasional dan memperkuat klaim kedaulatannya atas pulau tersebut. Sejak tahun 2018, ketegangan di kawasan meningkat seiring dengan semakin agresifnya tindakan Tiongkok, termasuk peningkatan aktivitas militer di sekitar Selat Taiwan dan kampanye diplomatik yang bertujuan mengurangi pengakuan internasional terhadap Taiwan. Dalam menghadapi ancaman ini, Taiwan telah meningkatkan kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat. Periode 2018 hingga 2023 ditandai dengan peningkatan penjualan senjata dari Amerika Serikat ke Taiwan, pelatihan militer bersama, dan penguatan kolaborasi strategis di berbagai bidang. Amerika Serikat, meskipun mengakui kebijakan "One China," tetap mempertahankan dukungannya terhadap Taiwan melalui *Taiwan Relations Act*, yang memungkinkan penyediaan bantuan pertahanan guna menjaga stabilitas di kawasan. Respon Tiongkok terhadap kerja sama ini sangat tegas, termasuk dengan meningkatkan latihan militer di sekitar Taiwan dan memperkuat kampanye diplomatik untuk mengisolasi Taiwan secara internasional. Ketegangan yang

meningkat ini tidak hanya berdampak pada hubungan Amerika Serikat-Tiongkok tetapi juga menimbulkan kekhawatiran akan stabilitas regional dan global. Melalui analisis ini, dapat dipahami bahwa kerja sama pertahanan Taiwan-Amerika Serikat memiliki implikasi yang luas terhadap dinamika keamanan di Asia Timur dan berpotensi mempengaruhi tatanan internasional dalam jangka panjang.

Kata kunci : Taiwan, Amerika Serikat, Kerja Sama Pertahanan dan *One China Policy*.

## **PENDAHULUAN**

Kerjasama pertahanan antara Taiwan dan Amerika Serikat telah menjadi salah satu aspek penting dalam dinamika politik dan keamanan di kawasan Asia Timur. Sejak akhir Perang Dunia II, hubungan antara Taiwan dan Amerika Serikat telah berkembang melalui berbagai fase, di mana keduanya sering kali menemukan diri mereka di persimpangan konflik geopolitik dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Satu dari banyak tantangan yang harus dihadapi oleh Taiwan dan Amerika Serikat dalam mempertahankan stabilitas di kawasan adalah kebijakan luar negeri Tiongkok yang dikenal sebagai "*One China Policy*" (Suisheng Zhao, 2002). Kebijakan ini menegaskan bahwa hanya ada satu Tiongkok, dan Taiwan adalah bagian tidak terpisahkan dari Tiongkok. Meski Taiwan memiliki pemerintahan yang berfungsi secara independen, Tiongkok mengklaim kedaulatan atas wilayah tersebut dan berusaha untuk menekan pengakuan internasional terhadap Taiwan sebagai negara yang berdaulat. Untuk mencapai tujuan ini, Tiongkok telah menggunakan berbagai instrumen, termasuk tekanan diplomatik, ekonomi, dan militer. Hal ini menciptakan ketegangan yang signifikan di kawasan, di mana Amerika Serikat, sebagai sekutu utama Taiwan, harus memainkan peran yang kompleks dan berhati-hati (Pan Zhongqi, 2003).

Sejak 2018, ketegangan antara Taiwan dan Tiongkok meningkat, seiring dengan meningkatnya aktivitas militer Tiongkok di sekitar wilayah Taiwan. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah pelantikan Presiden Tsai Ing-wen pada 2016, Taiwan semakin memperkuat kerja sama dengan Amerika Serikat di bidang pertahanan. Langkah ini dilihat sebagai upaya untuk memperkuat kemampuan pertahanan Taiwan dalam menghadapi potensi serangan dari Tiongkok. Di sisi lain, Amerika Serikat, di bawah beberapa pemerintahan yang berbeda, telah memperlihatkan komitmen yang berkelanjutan untuk mendukung Taiwan, meskipun dalam kerangka yang tidak secara eksplisit melanggar kebijakan "*One China*" (Fatmawati, Kenepri, K & Darma, 2023).

Periode 2018 hingga 2023 mencakup sejumlah peristiwa penting yang telah membentuk kerangka kerja sama pertahanan Taiwan-Amerika Serikat. Di satu sisi, periode ini ditandai dengan peningkatan penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan, pelatihan militer bersama, serta perjanjian yang memperkuat kerjasama intelijen dan strategi antara kedua negara. Di sisi lain, Tiongkok merespon dengan langkah-langkah yang lebih agresif, termasuk peningkatan latihan militer di sekitar Taiwan dan kampanye diplomatik yang bertujuan mengisolasi Taiwan secara internasional. Selain itu, perubahan dinamika geopolitik global, termasuk persaingan strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok, juga telah mempengaruhi kebijakan dan tindakan yang diambil oleh semua pihak yang terlibat. Dengan pemerintahan Amerika Serikat di bawah Donald Trump (2017-2021) dan kemudian Joe Biden (2021-sekarang), terdapat beberapa pergeseran dalam pendekatan kebijakan, meskipun komitmen dasar untuk mendukung Taiwan tetap konsisten. Kerjasama pertahanan ini tidak hanya penting bagi keamanan Taiwan, tetapi juga menjadi ujian bagi kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Asia Timur dan bagi stabilitas regional secara keseluruhan. Dengan latar belakang ketidakpastian global yang semakin meningkat dan tantangan yang dihadapi oleh tatanan internasional yang berbasis aturan, hubungan Taiwan-Amerika Serikat dalam bidang pertahanan menjadi salah satu isu kunci yang terus diawasi oleh komunitas internasional.

Sehubungan dengan terjalannya kerjasama bilateral antara Amerika Serikat dengan Taiwan dalam bidang pertahanan, terdapat beberapa literatur yang dapat di jadikan sebagai rujukan, seperti penelitian Fatmawati, Kenepri dan Muthia (2023) yang menjelaskan jika eskalasi ketegangan hubungan Taiwan dengan Tiongkok semakin meningkat setelah kebijakan “*One Tiongkok Policy*” didukung dengan rencana reunifikasi. Menyikapi reunifikasi, Taiwan terus mengupayakan kemerdekaannya dengan menerapkan dua strategi, yaitu *balancing eksternal* dan *balancing internal*. Adapun bentuk dari *balancing eksternal* Taiwan adalah melalui pembentukan aliansi. Selain Taiwan memiliki 14 negara yang berdiplomasi dengannya secara resmi, Taiwan telah menjalin kembali hubungan baik dengan sejumlah sekutu Amerika Serikat antara lain Australia, Jepang, dan Kanada. Sedangkan melalui strategi *balancing internal*, Taiwan terus mengupayakan peningkatan anggaran militer dalam negeri. Selanjutnya penelitian Prasetya (2005) yang menjelaskan pengambilan strategi defensif China, berdasarkan *offense-defense balance*, disebabkan oleh variabel *defense has advantage*. Oleh sebab itu, China lebih memilih untuk mempertahankan status quo daripada maju, menghancurkan dan melakukan reunifikasi secara paksa dengan Taiwan. Akan tetapi teori

*offense-defense* merupakan teori yang dinamis, sehingga jika menyerang menguntungkan, maka negara akan lebih memilih untuk menyerang daripada bertahan.

Mengacu kepada hasil penelitian sebelumnya, dapat dilihat jika hasil penelitian memberikan gambaran mengenai respon Taiwan terhadap kebijakan Tiongkok serta respon Tiongkok terhadap kebijakan Amerika Serikat mengenai Taiwan. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan secara rinci tentang latar belakang, dinamika, dan perkembangan kerjasama pertahanan antara Taiwan dan Amerika Serikat dalam menghadapi kebijakan luar negeri Tiongkok, khususnya dalam konteks "*One China Policy*" pada periode 2018 hingga 2023. Analisis ini akan mencakup berbagai aspek, mulai dari sejarah hubungan kedua negara, kebijakan pertahanan yang diadopsi, hingga respons Tiongkok terhadap kerjasama tersebut.

## **KERANGKA ANALITIK**

Untuk memperoleh kedalaman dan kebaruan dari penelitian ini, maka penulis perlu menguraikan teori yang relevan dengan berbagai sudut pandang yang dapat digunakan dalam rangka menunjang pembahas. Adapun teori yang digunakan pada penelitian ini, yaitu

### **1. Teori Neo-Realisme**

Dalam neorealisme, ada enam kunci yang menjadi pembahasan utama yaitu anarki, struktur, kemampuan, distribusi kekuatan, polarity dan kepentingan nasional. Dalam neorealisme, sebaliknya, struktur sistem, khususnya distribusi kekuatan relatif, merupakan fokus analitis utama. Aktor-aktor kurang begitu penting sebab struktur memaksa mereka beraksi dengan cara- cara tertentu (Robert dan Georg, 2009). Neorealisme percaya bahwa struktur internasional lah yang mempengaruhi negawaran untuk membuat suatu kebijakan. Mereka juga meyakini bahwa ada pembagian kekuatan serta hadirnya aktor non-negara yang dapat memperbaiki atau menengahi persaingan antar negara di Asia Tenggara. Sifat alami dari negara untuk mencari keamanan memaksa negara untuk waspada terhadap kerjasama internasional dan organisasi internasional (Yulius, 2007).

### **2. Konsep Kebijakan Luar Negeri**

Kebijakan luar negeri mempunyai tiga konsep untuk menjelaskan hubungan suatu negara dengan kejadian dan situasi di luar negaranya, yaitu: kebijakan luar negeri sebagai sekumpulan orientasi (*as a cluster of orientation*). Dalam hal ini kebijakan luar negeri berupa rencana dan komitmen konkrit yang dikembangkan oleh para pembuat keputusan untuk membina dan mempertahankan situasi lingkungan eksternal yang

konsisten dengan orientasi kebijakan luar negeri. Rencana tindakan ini termasuk tujuan yang spesifik serta alat atau cara untuk mencapainya yang dianggap cukup memadai untuk menjawab peluang dan tantangan dari luar negeri (Scott dan Linklater, 2012).

### 3. Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat kebijakan luar negeri sebuah negara. Lebih lanjut, kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur pembentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi (Perwita & Yani, 2005 : 35). Kepentingan nasional (*national interest*) berisi tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan negara, seperti keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayahnya) serta kesejahteraan (*prosperity*) (Rudy, 2002). Oleh karena itu, dalam merumuskan kepentingan nasional, hal yang perlu dipertimbangkan adalah kapabilitas negara dalam kekuasaan.

### 4. Konsep Aliansi

Konsep aliansi merupakan suatu perjanjian atau kesepakatan antara dua negara atau lebih untuk saling membantu dalam sebuah kondisi yang telah ditetapkan, biasanya ketika salah satu negara anggota perjanjian tersebut mengalami serangan oleh negara di luar anggota (Michael dan Nicholas, 1990).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif yang lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena. Pada metode ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan melalui literatur seperti skripsi, buku, jurnal dan laporan. Sedangkan untuk analisis data dilakukan melalui reduksi data dan penyajian data.

## **PEMBAHASAN**

Kebijakan "*One China*" yang dianut oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) merupakan landasan utama dalam hubungan luar negerinya, yang menegaskan bahwa hanya ada satu Tiongkok dan Taiwan adalah bagian tidak terpisahkan dari negara tersebut. Kebijakan ini telah menjadi salah satu pilar utama dalam upaya Tiongkok untuk menghalangi pengakuan internasional terhadap Taiwan sebagai entitas politik yang independen. Implikasi dari kebijakan ini sangat luas, terutama dalam hubungan internasional dan politik global. Sejak

pemerintahan Komunis Tiongkok mendeklarasikan Republik Rakyat Tiongkok pada 1949, Tiongkok telah secara aktif mendorong kebijakan "*One China*" untuk menekan pengakuan Taiwan sebagai negara berdaulat. Kebijakan ini berhasil mempengaruhi banyak negara untuk memutuskan hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan demi mempertahankan hubungan dengan RRT. Selain itu, kebijakan ini menjadi alat penting bagi Tiongkok untuk menegaskan klaim kedaulatan atas Taiwan dalam berbagai forum internasional. Dalam konteks hubungan Amerika Serikat-Taiwan, kebijakan "*One China*" menjadi faktor penentu yang kompleks. Amerika Serikat mengakui kebijakan ini secara resmi sejak normalisasi hubungan dengan Tiongkok pada 1979, namun tetap mempertahankan hubungan tidak resmi dengan Taiwan melalui *Taiwan Relations Act* (TRA). TRA memungkinkan Amerika Serikat untuk menyediakan bantuan pertahanan kepada Taiwan, yang dianggap penting untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Kawasan (Gede, 2017).

Periode 2018-2023 menandai peningkatan signifikan dalam kerja sama pertahanan antara Taiwan dan Amerika Serikat. Di tengah meningkatnya tekanan militer dan diplomatik dari Tiongkok, Taiwan telah berupaya memperkuat pertahanannya melalui kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat. Salah satu aspek paling menonjol dari kerja sama pertahanan ini adalah penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan yang di dasarkan pada *Six Assurances* 1982. Penjualan senjata ini mencakup berbagai sistem senjata canggih yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan Taiwan dalam menghadapi potensi serangan dari Tiongkok.

<b>Tahun</b>	<b>Alutsista yang Dibeli</b>	<b>Harga</b>
2017	Radar	\$400 juta
	Rudal AGM-154C JSOW	\$185,5 juta
	Rudal HARM AGM-88B	\$147,5 juta
	Rudal SM-2 Block IIIA	\$125 juta
	Kit Konversi Torpedo Ringan Mk-54	\$175 juta
	Torpedo Kelas Berat Mk-48	\$250 juta
	Peningkatan Sistem Peperangan Elektronik AN/SLQ-32	\$80 juta
	<b>Total: \$1.363 Miliar</b>	

<b>Tahun</b>	<b>Alutsista yang Dibeli</b>	<b>Harga</b>
2018	<i>Foreign Military Sales Order</i>	\$330 juta
	<b>Total: \$330 juta</b>	
2019	Pelatihan Pilot dan Dukungan Logistik F-16	\$500 juta
	Tank M1A2 Abrams	\$2 miliar
	Rudal Stinger	\$223,56 juta
	F-16 dan <i>associated support</i>	\$8 miliar
	<b>Total: \$10,72356 miliar</b>	
2020	Torpedo Berat Mk-48	\$180 juta
	Sertifikasi Ulang Rudal PAC-3	\$620 juta
	Peluncur, Pendukung dan Peralatan HIMARS	\$436,1 juta
	MS-110 <i>Recce Pods</i>	\$367,2 juta
	Rudal AGM-84H SLAM-ER	\$1.008 miliar
	Rudal Harpoon	\$2,37 miliar
	MQ-9B pesawat <i>remote piloted</i>	\$600 juta
	Sistem Komunikasi Informasi Lapangan atau <i>Field Information Communications System (FICS)</i>	\$280 juta
	<b>Total: \$5,8631</b>	

Sumber: Forum on the Arms Trade <https://www.forumarmstrade.org/ustaiwan.html>

Meningkatnya hubungan tidak resmi antara Amerika Serikat dan Taiwan terutama dalam bidang kerja sama militer membuat Tiongkok beranggapan Amerika Serikat terlalu mencampuri urusan dalam negeri yang juga mengancam keamanan nasional Tiongkok serta sebagai pelanggaran terhadap prinsip "*One China*". Respon Tiongkok terhadap peningkatan kerja sama pertahanan antara Taiwan dan Amerika Serikat selama periode ini sangat tegas dan sering kali agresif. Tiongkok memandang kerja sama ini sebagai ancaman langsung terhadap

kedaulatannya dan berulang kali menegaskan bahwa setiap upaya untuk memperkuat pertahanan Taiwan akan dihadapi dengan tindakan yang keras (Daniel dan Batty, 2010).

Salah satu cara utama Tiongkok menanggapi kerja sama Taiwan-Amerika Serikat adalah dengan meningkatkan aktivitas militer di sekitar Taiwan. Ini termasuk latihan militer skala besar di Selat Taiwan, penerbangan pesawat tempur ke zona identifikasi pertahanan udara Taiwan (ADIZ), dan pengerahan kapal perang di perairan sekitar Taiwan. Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk menunjukkan kekuatan militer Tiongkok dan memperingatkan Taiwan serta Amerika Serikat agar tidak melampaui batas. Selain itu, Tiongkok telah memperkuat kehadiran militernya di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur, yang menimbulkan kekhawatiran akan potensi eskalasi konflik di wilayah tersebut. Latihan militer Tiongkok yang semakin sering dan agresif di kawasan ini juga mencerminkan upaya Beijing untuk mempertegas klaim kedaulatannya dan mempersiapkan skenario konfrontasi militer jika diperlukan (Susan and Michael, 2023).

Di sisi diplomatik, Tiongkok terus berupaya untuk mengisolasi Taiwan di panggung internasional. Melalui tekanan diplomatik dan ekonomi, Tiongkok berhasil membuat beberapa negara memutuskan hubungan resmi dengan Taiwan dan mengalihkan pengakuan mereka kepada RRT. Tiongkok juga telah menggunakan kekuatannya untuk mempengaruhi kebijakan negara-negara lain dalam isu Taiwan, termasuk dengan menawarkan investasi atau mengancam dengan sanksi ekonomi. Kampanye diplomatik ini diperkuat dengan upaya untuk mengurangi ruang gerak Taiwan di organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Tiongkok berupaya keras untuk memastikan bahwa Taiwan tidak mendapatkan pengakuan atau partisipasi yang sah dalam forum-forum ini, yang menggarisbawahi tekanan berkelanjutan terhadap posisi internasional Taiwan (Taiwan Freedom in the World, 2020)

Kerjasama pertahanan yang semakin intensif antara Taiwan dan Amerika Serikat tidak hanya berdampak pada hubungan bilateral antara kedua negara, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas bagi stabilitas regional dan tatanan global. Meningkatnya ketegangan antara Taiwan, Amerika Serikat, dan Tiongkok telah memicu kekhawatiran akan potensi konflik berskala besar di Asia Timur, yang dapat berdampak pada keamanan dan ekonomi global. Kerjasama pertahanan ini telah menjadi salah satu titik pertikaian utama dalam hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok. Tindakan Amerika Serikat untuk memperkuat pertahanan Taiwan dipandang oleh Tiongkok sebagai pelanggaran serius terhadap kesepakatan diplomatik



yang ada dan ancaman terhadap kedaulatan Tiongkok. Akibatnya, hubungan antara Washington dan Beijing telah mengalami ketegangan yang signifikan, yang mencakup perang dagang, persaingan teknologi, dan konflik di wilayah lain seperti Laut Cina Selatan .

Di tingkat regional, kerjasama pertahanan ini telah memicu perlombaan senjata dan meningkatkan ketidakpastian di antara negara-negara tetangga. Negara-negara di Asia Timur, seperti Jepang dan Korea Selatan, mengamati dengan cermat perkembangan ini, karena mereka juga terlibat dalam dinamika keamanan yang kompleks dengan Tiongkok. Peningkatan aktivitas militer di kawasan ini juga meningkatkan risiko insiden yang tidak disengaja, yang dapat dengan cepat memicu eskalasi konflik. Tindakan Tiongkok tersebut tidak hanya memicu munculnya kekhawatiran di wilayah Taiwan, tetapi wilayah kawasan, dan bahkan internasional. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya konflik besar dan melibatkan banyak negara atau wilayah-wilayah kecil. Tiongkok bersiteguh untuk berusaha menyatukan kembali wilayah Taiwan dengan Tiongkok melalui serangan Tiongkok kepada Taiwan ini bisa memicu depresi ekonomi global dengan adanya penghentian produksi semikonduktor tercanggih. Amerika Serikat harus bersaing dengan kurangnya *chip* yang memaksa perusahaan untuk mengurangi atau bahkan menghentikan produksi (Susan and Michael, 2023).

Melihat ke depan, kerja sama pertahanan antara Taiwan dan Amerika Serikat kemungkinan besar akan terus berlanjut. Selain membantu Taiwan dengan menyalurkan persenjataan, Amerika Serikat juga mendukung partisipasi Taiwan dalam organisasi internasional atau forum internasional, mendukung jalannya pemilihan umum di Taiwan dan menanam investasi di Taiwan. Jika dilihat dari permasalahan yang ada, Amerika Serikat secara tidak langsung memang ikut mencampuri konflik internal antara Taiwan dengan Tiongkok, walaupun Amerika Serikat sering membantahnya. Hal tersebut tidak lepas dari kepentingan Amerika Serikat, yaitu mengembangkan demokrasi di wilayah Taiwan dan menjaga stabilitas di selat Taiwan agar tidak terjadi perpecahan yang bisa mengancam *international security*.

## **KESIMPULAN**

Kerja sama pertahanan antara Taiwan dan Amerika Serikat selama periode 2018-2023 telah menjadi salah satu faktor kunci dalam menjaga keseimbangan kekuatan di Asia Timur di tengah meningkatnya ketegangan dengan Tiongkok. Meskipun Amerika Serikat mengakui kebijakan "One China," komitmennya untuk mendukung pertahanan Taiwan melalui penjualan senjata, latihan militer bersama, dan dukungan strategis lainnya menunjukkan pentingnya Taiwan dalam strategi keamanan Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik. Respon Tiongkok

terhadap peningkatan kerja sama ini sangat agresif, dengan peningkatan aktivitas militer di sekitar Taiwan dan upaya diplomatik untuk lebih mengisolasi Taiwan di panggung internasional. Ketegangan yang semakin memuncak ini tidak hanya menambah kompleksitas hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok tetapi juga meningkatkan risiko konflik yang dapat mengganggu stabilitas regional dan global. Kesimpulannya, kerja sama pertahanan Taiwan-Amerika Serikat tidak hanya berfungsi sebagai langkah pencegahan terhadap potensi agresi dari Tiongkok tetapi juga memiliki implikasi yang jauh lebih luas bagi dinamika keamanan di Asia Timur dan tatanan global. Oleh karena itu, kerja sama ini harus terus dipertahankan dan diperkuat, dengan tetap memperhatikan risiko eskalasi dan dampak jangka panjangnya terhadap hubungan internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Susan M. Gordon and Michael G. Mullen. (2023) *Independent Task Force Report No. 81: US-Taiwan Relations in a New Era: Responding to a More Assertive China*. New York: Council on Foreign Relations.
- Taiwan: *Freedom in the World 2020*” Freedom House, internet. 25 Juni 2023, <https://freedomhouse.org/country/taiwan/freedom-world/2020>
- Forum on the Arms Trade <https://www.forumarmstrade.org/ustaiwan.html>
- Daniel Nasaw dan David Batty (2010) *China retaliates over US arms sales to Taiwan, The Guardian*, diakses melalui <https://www.theguardian.com/world/2010/jan/30/china-sanctions-taiwan-arms-sales>.
- I Gede Mario Mahadiyasa. (2017). Faktor Pendorong Perubahan Sikap Politik Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap China Terkait Penerapan One China Policy pada Masa Pemerintahan Presiden Obama (2009-2017). *Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional*. Vol. 1 No. 1
- Michael Roskin dan Nicholas Berry. (1990) *IR: An Introduction to International Relations*, New Jersey: Prentice Hall
- Suisheng Zhao. (2002). *The U.S. Recognition of China: A Retrospective*, *The Washington Quarterly*, vol. 25, No. 3
- Pan Zhongqi. (2003). *US Taiwan Policy of Strategic Ambiguity: A dilemma of deterrence*, *Journal of Contemporary China*, Vol 12, No 35
- Fatmawati, F., Kenepri, K., & Darma, M. (2023). *Strategi Balancing Taiwan terhadap Tiongkok dalam Merespon Reunifikasi*. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, Vol 8, No 4.

- Prasetya, D. M. (2005). *Strategi Defensif China Dalam Merespon Kebijakan Amerika Serikat Atas Taiwan*. Jurnal Studi Hubungan Internasional, Vol 2 No 1.
- Robert Jackson dan Georg Sorensen. (2009). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yulius P. Hermawan. (2007). *Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Scott Bruchill dan Andrew Linklater. (2012). *Theory of Relations*, Tejemahan M. Sobirin Bandung: Nusa Media.